



***“Dari Fakultas Sastra ke Fakultas
Ilmu Pengetahuan Budaya”***

ORASI ILMIAH

oleh

Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono

2002

**Dies Natalis
Fakultas Sastra Universitas Indonesia
yang ke – 62**

DARI FAKULTAS SASTRA KE FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

oleh
Sapardi Djoko Damono

The most efficient organisation of higher education in response to globalisation would act to increase the diversity of institutions and their curricula. Countries that achieve high levels of diversity in higher education will, over the long term, be in a much more favourable position than those countries that follow the fads and end up with standardised and uniform institutions.

(Noel F. McGinn, "The Implications of Globalisation for Higher education")

Sampai dengan akhir tahun 50-an atau awal tahun 60-an, nama Fakultas Sastra di Indonesia tidak seragam. Kita pernah mengenal adanya Fakultas Sastra dan Filsafat, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, dan Fakultas Sastra-Budaya. Nama nenek moyang fakultas-fakultas itu adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, bernama *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte*, yang kuliah pertamanya dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 1940. Itulah sebabnya setiap tanggal tersebut kita mengadakan semacam acara untuk mensyukuri lahirnya lembaga yang memberi perhatian khusus terhadap ilmu pengetahuan budaya. Fakultas-fakultas yang berbeda-beda namanya, yang didirikan sejak Kemerdekaan itu menyediakan ilmu atau disiplin yang berbeda-beda pula. Pada awalnya, fakultas yang merupakan bagian dari Universitas Indonesia ini terdiri atas empat jurusan, yakni Jurusan Sastra Indonesia, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial, Jurusan Ilmu-ilmu Sejarah, dan Jurusan Ilmu Bangsa-bangsa. Sementara itu, di

lembaga yang sekarang bernama Universitas Gadjah Mada, fakultas yang sejenis memiliki beberapa jurusan antara lain Jurusan Sastra Timur, Jurusan Sastra Barat, dan Jurusan Sejarah. Penyelenggaraan kegiatan keilmuan semacam itu mencerminkan adanya kebhinekaan dalam berpikir, di samping tentu saja tersedianya pakar dan sarana di masing-masing lembaga. Berdasarkan itu semua jelaslah bahwa sama sekali tidak ada keseragaman dalam visi dan misinya, hal-hal yang secara langsung berakibat pada perbedaan penyusunan kurikulum.

Penggunaan nama 'sastra' di semua lembaga itu mungkin sekali erat kaitannya dengan *letteren* yang dipergunakan dalam lembaga terdahulu. Jika demikian halnya, maka lembaga kita ini dimaksudkan untuk mendidik mahasiswa agar menjadi manusia yang dalam bahasa Belanda disebut *geletterd* atau dalam bahasa Inggris *lettered* yang sering juga bisa dipertukarkan dengan *cultured*. Dalam hal ini, *lettered* tidak sekedar berarti melek huruf tetapi juga melek budaya; oleh sebab itu dalam bahasa Inggris dikenal kata *unlettered* dan *uncultured*, orang yang tidak berpendidikan, meskipun mungkin tidak buta huruf. Jika kata 'sastra' tidak usah kita kait-kaitkan dengan *letteren*, maka asal-usul kata itu adalah *śāstra*. Menurut A. Teeuw,¹ dalam bahasa Indonesia sastra berasal dari bahasa Sanskerta, *śāstra*; *śās* berarti "mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi." Akhiran *-tra* biasanya berarti alat atau sarana. Jadi, sastra adalah "alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau buku pengajaran." Contohnya adalah *śilpasāstra*, dan *kāmasāstra*. Yang pertama berarti buku tentang arsitektur, yang kedua tentang seni bercinta.

Dalam perkembangan selanjutnya, 'sastra' mengalami proses yang menurut Masinambouw² telah mengalami penyusu-

¹ A. Teeuw, *Sastra dan ilmu sastra*, 1984.

² E.K.M. Masinambouw, Paper yang dipersiapkan untuk BPPS-FSUI dalam rangka perubahan nama fakultas, 2001.

sutan atau penyempitan makna. Dalam pengertian kita sekarang, 'sastra' adalah tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan kenyataan, jadi yang bersifat rekaan, dan secara implisit maupun eksplisit mempunyai nilai estetik. Tidak mengherankan jika lembaga kita ini oleh masyarakat dianggap mendidik mahasiswa untuk menjadi sastrawan – suatu hal yang tidak jarang menjadikan orang tua merasa was-was dan risau. Dalam keadaannya sekarang, fakultas ini mengkaji, mengembangkan, dan menawarkan pengetahuan dan ilmu budaya yang mencakup linguistik, sejarah, arkeologi, filsafat, dan sastra – di samping ilmu perpustakaan yang sudah sejak lama berniat menjadi lembaga terpisah.

Mungkin sekali itu semualah yang menjadi dorongan bagi lembaga-lembaga sejenis di Indonesia untuk mengubah nama Fakultas Sastra. Setidaknya sejak tahun 1987, gagasan mengenai penggantian nama itu muncul dan kemudian menjadi gagasan bersama di kalangan fakultas-fakultas sastra. Menurut Masinambouw, ada tiga pilihan nama yakni Fakultas Humaniora, Fakultas Ilmu-ilmu Budaya, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Mengenai kesepakatan penggantian itu tentu kita bisa bertanya-tanya: apa gunanya nama diubah tetapi isinya tetap sama? Perlu diingat bahwa yang jauh lebih penting dilakukan adalah mengubah isi, dan bukan nama. Namun, harus juga diterima kenyataan bahwa lembaga ini adalah suatu sistem yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan luas, yakni masyarakat. Keadaan itu menyebabkan kita sebaiknya menyadari bahwa apa yang terjadi dalam sistem yang lebih besar itu akan berdampak pada sistem kita, termasuk penamaan lembaga. Kita tentu juga menyadari bahwa penggantian nama akan mendorong kita untuk mengadakan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perlu dicatat bahwa tidak diperlukan keseragaman dalam penggantian nama itu; tiga pilihan nama itu sebaiknya diartikan sebagai contoh saja. Kita tentu khawatir bahwa jika ada kesepakatan dalam pemilihan nama, nanti akan timbul pula kesepakatan untuk

menyeragamkan lembaga-lembaga kita ini, suatu hal yang sangat berbahaya bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Keunikan yang sudah seharusnya menjadi ciri khas masing-masing lembaga itu hilang, atau setidaknya menjadi kabur, ketika sekitar tahun 1970-an ada keharusan untuk menyeragamkan cara berpikir dan bertindak. Cara menata lembaga tinggi kita harus seragam seperti halnya mengenakan baju safari atau Korpri. Nama lembaga semacam ini harus Fakultas Sastra, jurusan dan program studinya juga sama, kurikulumnya pun diatur dan ditentukan oleh lembaga di luar fakultas dan universitas. Yang segera tampak jelas dalam usaha penyeragaman itu adalah anggapan bahwa (a) semua fakultas sastra harus mengembangkan ilmu yang sama, (b) tersedia tenaga akademik yang sama jumlah dan mutunya di semua fakultas sastra, (c) ilmu dan tenaga akademik yang ada bisa 'diterapkan' di semua tempat, dan (c) masyarakat memerlukan lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

Ditinjau dari segi tujuan pendidikan, penyeragaman dapat dipergunakan sebagai alat untuk represi ataupun indoktrinasi, di bidang ideologi maupun ilmu pengetahuan. Keadaan yang sudah berlangsung puluhan tahun terakhir ini tampaknya didasarkan pada keinginan untuk menciptakan keseragaman berpikir, bereaksi, dan menanggapi sesuatu. Ini sesuai dengan slogan kita selama ini yang lebih menekankan pada 'kesatuan' tinimbang 'kebhinekaan.' Penyeragaman itu tampak dalam berbagai hal; fakultas seperti yang kita miliki ini diharuskan bernama Fakultas Sastra. Akibatnya adalah bahwa keberagaman nama yang ada sejak Kemerdekaan hapus sama sekali. Penyeragaman itu bahkan sampai pada penyebutan jurusan dan program studi secara eksplisit; ini merupakan halangan untuk mengembangkan jenis-jenis program studi yang tidak tercantum dalam daftar tersebut. Upaya penyeragaman itu bahkan masuk ke dalam kegiatan akademik, yakni berupa kurikulum yang beberapa butirnya ditentukan di luar fakultas dan universitas. Dalam zaman yang konon setiap harinya menumbuhkan puluhan (cabang)

ilmu baru dan kebutuhan baru dalam masyarakat, tidak adanya kebebasan dalam mendirikan program studi dan menentukan kurikulum sendiri semacam itu jelas bertentangan dengan hakikat pendidikan tinggi.

Penyeragaman itu juga mengesampingkan kenyataan bahwa masing-masing perguruan tinggi memiliki tenaga akademik yang kemampuan dan bidang ilmunya berlain-lainan. Keberagaman yang membuat kita gembira itu akan sama sekali tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya jika perguruan tinggi dibatasi dalam pembentukan jenis program studi dan diharuskan mengikuti kurikulum yang seragam. Di samping sebagai alat politik, mungkin sekali penyeragaman itu kita usahakan sebab kita mengandaikan Indonesia sebagai negeri sempit yang tunggal, yang tidak bhineka. Rupanya kita suka melupakan kenyataan bahwa di samping terdiri atas ribuan pulau, negeri kita ini didukung oleh sejumlah besar kebudayaan yang berbeda satu sama lain dan yang mungkin sekali memerlukan jenis program studi atau kurikulum yang berbeda-beda pula untuk bisa berkembang dengan wajar. Pada hemat saya, aneh sekali jika kita mengandaikan, misalnya, studi mengenai sastra Indonesia modern dengan kurikulum yang seragam dapat dikembangkan di mana pun di Indonesia. Dalam kenyataannya, karena sarana yang berbeda-beda mungkin studi semacam itu hanya dapat berkembang wajar di beberapa tempat saja, seperti Jakarta, Bandung, dan Yogya. Di tempat lain, misalnya saja Manado atau Ambon, yang diperlukan adalah jenis program studi yang melaksanakan kurikulum yang lain pula.

Negeri kita yang sangat luas dengan ciri-ciri sosial, ekonomi, dan budaya yang juga beragam tentu saja tidak mengharapkan lulusan perguruan tinggi yang berpengetahuan seragam. Perkembangan dan dampak globalisasi memaksa masing-masing daerah untuk mempersiapkan tanggapan evaluatif yang berbeda-beda pula, yang pada gilirannya tercermin dalam penyelenggaraan pendidikannya, termasuk pendidikan tinggi. Perkembangan masyarakat di masa datang justru memerlukan lulusan perguruan tinggi yang semakin

tinggi taraf keberbagaian keterampilan dan pengetahuannya. Kita mendidik dengan tujuan menjadikan mahasiswa manusia yang siap menghadapi masa depan. Dan karena masa depan itu semakin beragam ciri dan sifatnya, keseragaman tidak mungkin dipertahankan. Dalam hal ini ada baiknya jika kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ki Mangoensarkoro pada hampir lima puluh tahun yang lalu.

Dalam rangka Kongres Kebudayaan III di Solo pada tahun 1954 Ki Mangoensarkoro menyampaikan sebuah prasaran yang berjudul "Pendidikan Kebudayaan dalam Masyarakat Sekolah." Dalam prasaran itu antara lain dikatakannya bahwa masyarakat sekolah merupakan tempat pemeliharaan bibit bagi kekuatan hidup masyarakat di masa datang; oleh karenanya sekolah merupakan sumber kekuatan baru dalam masyarakat. Jadi, bagi masyarakat, sekolah merupakan pusat daya dinamik *in optima forma*. Karena itu, katanya,

... pendidikan di sekolah itu ditujukan kepada waktu yang akan datang, dan oleh karenanya pendidikan kebudayaan ditujukan pada keadaan dan kemungkinan kebudayaan di waktu yang akan datang. Kalau tidak, maka pendidikan itu adalah pendidikan yang salah masa dan akhirnya menimbulkan kekuatan anakronisme yang mau tidak mau merupakan kekuatan destruktif atau reaksioner di waktu yang akan datang.

Dalam pandangan Mangunsarkoro itu tersirat syarat bagi pendidikan untuk mendorong tumbuhnya kematangan lulusan dalam berbagai perkembangan individunya, suatu hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Ditekankannya juga hubungan yang ada antara sekolah dan perkembangan masyarakat di masa datang. Karena pendidikan tidak bisa dipisahkan sama sekali dari perkembangan dan kebutuhan masyarakat, ada baiknya jika kita mem-

pertimbangkan gagasan mengenai kriteria program akademik seperti berikut.

Program akademik harus menarik agar masyarakat berminat mengikutinya, sebab jika tidak, sama sekali tidak ada alasan bagi pendidikan tinggi untuk mengambil dana masyarakat. Di mana pun, masyarakat merupakan penyumbang terbesar bagi kelangsungan hidup pendidikan, oleh karenanya kita tidak bisa berada di sebuah menara gading dan beranggapan bahwa bisa hidup tanpa mempedulikan kebutuhannya. Dengan demikian, program pendidikan tinggi semestinya mampu membantu individu maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatannya agar berlaku prinsip memberi dan menerima. Perguruan tinggi tidak bisa hanya merasa berhak menerima saja, tanpa merasa berkewajiban untuk memberi. Kegiatan di pendidikan tinggi ditentukan oleh visi dan misinya, yang pada intinya merupakan janji kepada masyarakat. Sampai saat ini kita meyakini kebenaran anggapan bahwa pendidikan tinggi memiliki tridharma, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggapan itu kita terima begitu saja sebagai kebenaran, padahal -- setidaknya menurut H.A.R. Tilaar³, selayaknya ditinjau kembali sebab perlu dipertanyakan apakah masih ada kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Di berbagai universitas di negeri lain, visi masing-masing lembaga berbeda-beda pula. Namun, yang perlu adalah bahwa pendidikan tinggi harus mampu melaksanakan apa yang dijanjikan itu.

Karena setiap lembaga pendidikan tinggi memiliki lingkungan, sarana, dan tenaga akademik yang berbeda-beda, ia sebaiknya mengembangkan ilmu pengetahuan dan menawarkan program-program studi yang berbeda pula dengan lembaga lain. Inilah hal penting yang perlu dilakukan agar dampak negatif penyeragaman itu bisa sama sekali dihapuskan. Lembaga ini juga sebaiknya memiliki fungsi dalam masyarakat, yakni memberi bekal pengetahuan dan kete-

³ H.A.R. Tilaar, *Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam persepsi* *dad ke-21*, 1998, Sapardi Djoko Damono, FIB UI, 2002

rampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di masa kini dan terutama di masa datang, bagi lulusannya.

Perubahan nama dari Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya tentu diharapkan mampu mengubah berbagai anggapan kita selama ini berkenaan dengan tugas-tugas lembaga akademik kita ini. Dari kaca mata masyarakat, nama yang baru itu diharapkan bisa meredakan "kekhawatiran" bahwa lembaga ini mendidik mahasiswa menjadi sastrawan. Bahwa kemudian di antara lulusannya ada yang menjadi sastrawan, itu soal lain sama sekali. Meskipun kekhawatiran semacam itu hapus, akan muncul pertanyaan baru: apa gerangan ilmu pengetahuan budaya itu. Pertanyaan semacam itu setidaknya melegakan kita karena lembaga ini dianggap memberikan ilmu pengetahuan, seperti halnya fakultas-fakultas lain. Tugas kita yang mendesak kemudian adalah berusaha menjelaskan, pertama-tama kepada diri sendiri, apa yang dimaksudkan dengan nama itu. Karena berkaitan dengan kebudayaan, tidak mudah bagi kita untuk melaksanakan tugas itu.

Definisi kebudayaan tidak terbatas jumlahnya⁴, dan untuk keperluan pertemuan ini saya ringkas saja sebagai berikut. Secara khusus, kebudayaan adalah pencapaian estetik dan intelektual orang seorang atau masyarakat, yang juga merupakan gaya hidup masyarakat yang diwariskan turun-temurun. Kebudayaan berurusan dengan nilai-nilai, yakni prinsip-prinsip moral dan keyakinan yang dianggap penting dalam kehidupan sehingga masyarakat cenderung menjalankannya berdasarkan prinsip-prinsip itu. Dalam kaitannya dengan hubungan antara kebudayaan dan perkembangan masyarakat ada dua pandangan yang perlu disebutkan. Yang pertama menyatakan bahwa proses pembentukan kebudayaan terjadi secara alamiah sesuai dengan cara berpikir orang-orang yang membentuk masyarakat itu, namun

⁴ Dalam *Keywords*, 1976, Raymond Williams menyatakan bahwa kata *culture* merupakan satu di antara dua atau tiga kata dalam bahasa Inggris yang paling sulit dijelaskan. (Sugandi Djoko Damono, FIB UI, 2002)

pandangan kedua menyatakan bahwa perkembangan kultural masyarakat tergantung sama sekali pada kondisi material hidupnya, yakni sumber energi, teknologi, dan sistem produksi yang ada dalam kelompok-kelompok masyarakat itu.

Di samping itu, pengaruh sekeliling juga dianggap penting sebab pertumbuhan sistem kultural yang kompleks terutama sekali ditunjang oleh hal-hal yang berkaitan dengan masalah geografis dan iklim. Meskipun hal itu ada juga benarnya, sekarang ini sebagian besar ilmuwan berpandangan bahwa pengaruh materi seperti yang disebut tadi yakni energi yang ada, teknologi yang ada, dan organisasi produksi dianggap sebagai komponen-komponen utama dalam evolusi kultural dan proses sosial. Namun, kekuatan gagasan juga ikut mempengaruhi, seperti misalnya pengaruh gagasan Islam di berbagai negara di dunia di samping juga pertentangan antara paham komunis dan non-komunis.

Itulah semua hal yang menjadi cakupan ilmu pengetahuan budaya. Perkembangan dan sistem kultural yang kompleks itulah yang menjadi landasan dan sekaligus sasaran penelitian ilmu pengetahuan budaya. Segera akan diketahui bahwa itu menyangkut hal-hal yang menjadi sasaran ilmu-ilmu sosial. Kenyataan itu tidak bisa dikesampingkan. Proses pembentukan kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai dan norma-norma sama sekali tidak bisa dipisahkan dari, misalnya, sistem produksi yang ada dalam masyarakat bersangkutan. Gagasan itulah mungkin yang mula-mula melandasi dimasukkannya Jurusan Ilmu-ilmu Sosial dan Jurusan Ilmu Bangsa-bangsa ke dalam fakultas ini. Dalam kecenderungan yang terjadi puluhan tahun belakangan ini, batas-batas antara satu bidang ilmu dan bidang ilmu yang lain tampak semakin kabur -- seperti yang jelas tampak pada sejumlah skripsi, tesis, dan disertasi yang telah dipertahankan di lembaga ini.

Di fakultas kita ini, batas-batas tegas antara setidaknya Ilmu-ilmu Sejarah, Sastra, Bahasa, Arkeologi, dan Filsafat semakin kabur dalam berbagai kegiatan ilmiah yang dilaksanakan. Namun demikian, setidaknya ada hal pokok

yang menjadi dasar persamaannya, yakni bahwa semua disiplin itu memasalahkan nilai-nilai dengan cara menafsirkan. Nilai-nilai dan tafsir inilah pada hemat saya yang menjadi ciri ilmu pengetahuan budaya. Batu atau suara, tulisan atau gambar, peristiwa atau gagasan -- semuanya ditafsirkan berdasarkan kaitannya dengan nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan masyarakat. Jika kita menengok apa yang telah diputuskan bersama oleh para pimpinan Fakultas Sastra baru-baru ini, tampaknya ilmu pengetahuan budaya ini dianggap sama dengan *Humaniora*, yang dalam bahasa Inggris berarti *the Humanities*. Bidang ini, di negeri-negeri Barat, mencakup antara lain ilmu-ilmu sejarah, sastra, bahasa, filsafat, ilmu-ilmu yang sekarang ini kita kembangkan.

Dan pengembangan fakultas yang bernama Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya akan didasarkan pada modal yang telah ada itu. Perkembangan dan dinamika masyarakat tentu saja menuntut agar lembaga ini memikirkan kembali segala sesuatu yang berkaitan dengan struktur maupun sistem akademik yang ada. Program-program studi yang dikembangkan haruslah mengikuti perubahan-perubahan sosial dan menjangkau ke masa depan. Keadaan yang statis, seperti yang telah terjadi selama sekitar 40 tahun terakhir ini, harus dicairkan. Jika dalam lembaga ini tidak pernah ada perubahan selama puluhan tahun, apakah masyarakat akan masih percaya bahwa salah satu fungsi perguruan tinggi adalah sebagai *agent of change*? Saya akan mengambil satu contoh saja dari salah sebuah universitas di Inggris, yakni Birmingham University yang pada tahun 1964 mendirikan *Centre for Contemporary Cultural Studies*. Pusat penelitian itu mula-mula merupakan bagian penelitian pascasarjana dari *English Department*, tetapi kemudian berkembang pesat sebagai sebuah lembaga interdisiplin yang mandiri, yang sekarang mempunyai pengaruh yang besar di hampir semua belahan dunia dan dianggap penting kedudukannya dalam kegiatan penelitian di bidang kebudayaan

Tentu kita tidak usah meniru apa yang terjadi di mana pun jika itu tidak cocok dengan keadaan dan kebutuhan kita.

Namun, suatu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa keberadaan jurusan dan program studi seperti yang ada sekarang ini harus kita tinjau kembali. Kita harus menciptakan suatu sistem yang memungkinkan terwujudnya program-program studi baru yang merupakan jawaban terhadap perkembangan masyarakat, tanpa mengorbankan komitmen kita terhadap perkembangan ilmu. Pada hemat saya, pemecahan yang baik adalah memilah kedudukan dan fungsi antara jurusan dan program studi. Jurusan adalah sarang bagi para ilmuwan di bidang ilmu tertentu untuk mengembangkan diri, terutama dengan cara melakukan riset. Bidang-bidang ilmu yang ada di fakultas ini adalah sejarah, arkeologi, linguistik, sastra, filsafat, dan perpustakaan. Bidang-bidang studi itulah yang merupakan jurusan. Masing-masing jurusan memiliki sejumlah ilmuwan yang siap menawarkan ilmunya dalam bentuk mata kuliah. Dari sejumlah besar mata kuliah yang ditawarkan oleh berbagai program studi itulah kemudian lembaga ini mengelompokkannya ke dalam unit-unit yang disebut program studi, yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat. Unit-unit itu berjenjang-jenjang, mulai dari Program Diploma sampai dengan S3. Dalam hal ini kita juga harus mengubah pandangan bahwa fakultas adalah S1 dan menganggap jenjang-jenjang lain sebagai tambahan saja. Dalam membentuk unit-unit itu kita juga sebaiknya menerima kenyataan bahwa tidak semua mahasiswa berkeinginan menjadi *scholar* 'sarjana, ilmuwan.' Itu hal wajar yang sudah selayaknya menjadi landasan pembentukan program-program studi sesuai dengan jenjangnya. Program-program studi itu juga merupakan unit-unit yang utuh, yang tidak perlu mensyaratkan unit pada jenjang studi di bawahnya dalam menerima mahasiswa.

Dengan cara demikian kita sama sekali tidak mengkhianati tugas kita sebagai ilmuwan, yang kita lakukan di jurusan; sekaligus juga tidak berada di menara gading, sebab hubungan langsung dengan masyarakat dilaksanakan melalui program studi. Dan yang lebih penting adalah aspek dinamika yang ada pada sistem ini, yakni bahwa kapan pun kita bisa

membentuk atau mengakhiri program studi tanpa mengganggu kegiatan ilmiah yang dilakukan di dalam jurusan-jurusan yang ada. Bahkan di masa datang lembaga ini bisa mempertimbangkan untuk membentuk jurusan-jurusan baru seperti kesenian dan ilmu agama, jika sudah tersedia sarana dan sumber daya manusia.

Akhir kata saya mengharapkan bahwa penggantian nama dari Fakultas Sastra ke Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ini tidak sekedar penggantian kulit tanpa perubahan isi, tetapi lebih berupa perubahan ke cara berpikir dan kegiatan yang dinamis, yang bebas dari keinginan untuk seragam, tanpa mengorbankan pengembangan ilmu dan hubungan dengan masyarakat. ***

Depok, 23 Januari 2002